

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Perempuan merupakan unsur penting dalam kehidupan masyarakat terutama dalam pembangunan di Indonesia, baik dalam bidang pendidikan, ekonomi, kesehatan, politik, dan sosial. Kondisi perempuan perlu mendapat perhatian penuh dari pemerintah Indonesia. Sayangnya di Indonesia, para perempuan dihadapkan dengan berbagai permasalahan seperti permasalahan gender. Hal ini dapat dilihat dari kualitas perempuan masih rendah dibandingkan dengan laki-laki. Kurangnya peran perempuan dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat dalam negara mampu merepresentasikan keterbatasan pengetahuan mengenai kesamaan hak gender masyarakat Indonesia dan kurangnya taraf hidup perempuan. Bias gender tentu saja akan menjadi kendala dalam menciptakan kesetaraan dan keadilan gender, yang ditunjukkan dengan tidak adanya ketimpangan gender, dan dengan sehingga mereka dapat mengakses peluang untuk berkontribusi, dan kontrol atas pembangunan serta meraih manfaat yang setara dan adil dari pembangunan (Rahayu, 2022).

Permasalahan lain yang dihadapi oleh perempuan ialah pelecehan, KDRT, bahkan perceraian. Oleh karena itu, peningkatan pemberdayaan perempuan harus direalisasikan dengan baik dengan membuat sebuah program agar mereka dapat memiliki kekuatan, kemampuan, serta kemandirian. Salah satu bukti dari kurangnya pemerintah dalam fokus mengatasi permasalahan perempuan yaitu dapat diukur melalui Indeks Pembangunan Gender (IPG). Terbatasnya keterlibatan perempuan dalam

pertumbuhan nasional merujuk pada kondisi dimana perempuan tidak berdaya dari segi sosial, pendidikan, dan bahkan ekonomi. Para perempuan yang tidak berdaya biasanya berasal dari keluarga dengan kondisi ekonomi yang rendah. Perempuan dengan taraf perekonomian yang rendah tersebut hanya mengandalkan pendapatan sang suami. Hal tersebut disebabkan karena masih adanya stigma bahwa perempuan memiliki tanggung jawab rumah tangga, seperti beberes rumah, memasak di dapur, dan tugas rumah tangga lainnya. Situasi ini diperburuk dengan tidak adanya modal untuk membuka usaha rumahan.

Pada dasarnya, perempuan memiliki peran dalam pembangunan nasional. Perempuan bukan hanya bertugas untuk memajukan dirinya sendiri dan keluarganya saja, tetapi juga memiliki peran dalam pembangunan negara terutama dalam sektor perekonomian. Menurut data dari Badan Pusat Statistik tahun 2021, sebanyak 64,5 persen dari total Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia dikelola oleh perempuan. Maka, perempuan diharapkan mampu untuk meningkatkan perekonomian dengan keterlibatannya. Peningkatan keikutsertaan dan peran perempuan dalam proses pembangunan negara juga termasuk kedalam salah satu tujuan *Sustainable Development Goals* ke-5 yaitu mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan. Dalam mencapai kesetaraan gender salah satu usaha yang memungkinkan untuk dilakukan yakni melalui pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat di kalangan perempuan.

Gambar 1. 1 Komponen SDGs



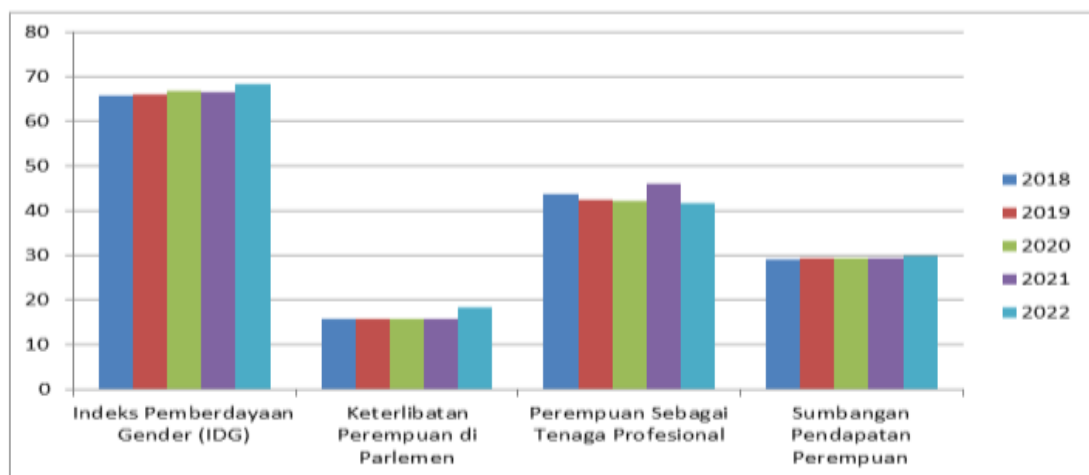
Sumber: Sdgs Indonesia, 2023

Pemberdayaan sendiri berarti peningkatan, meningkatkan, menjadi sempurna yang berarti mengubah. Pemberdayaan sangat identik dengan pendidikan, karena aspek dengan pendidikan non-formal adalah usaha untuk memberdayakan manusia.

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, “pendidikan non-formal dapat didefinisikan sebagai jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang”. Menurut Marzuki (2012) dalam (Syaadah et al., 2023) menyatakan pendapat bahwa pendidikan non-formal adalah kegiatan belajar di luar pendidikan formal secara sistematis. Pendidikan non-formal dilakukan terpisah merupakan unsur utama dari sebuah aktivitas yang lebih luas cakupannya untuk memenuhi kebutuhan peserta didik yang dituju dan pembelajaran yang spesifik.

Salah satu Provinsi di Indonesia yang mempunyai strategi pemberdayaan perempuan ialah Provinsi Jawa Barat. Dilihat dari angka populasi yang dimiliki oleh Provinsi Jawa Barat pada tahun 2023 yaitu sebesar 49,86 juta orang dengan angka penduduk laki-laki sebesar 25,26 juta jiwa dan angka penduduk perempuan sebesar 24,59 juta jiwa, dapat dilihat bahwa jumlah penduduk hampir berimbang namun tidak diikuti dengan kualitas yang berimbang (Badan Pusat Statistik, 2023). IPM (Indeks Pembangunan Manusia) Jawa Barat pada tahun 2023 sebesar 74,24 dan capaian Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) Jawa barat tahun 2023 mencapai 71,7 persen. Masih rendahnya tingkat pendidikan dan sumbangan perempuan di Jawa Barat merupakan masalah utama dari kesenjangan laki-laki dan perempuan. Rendahnya tingkat pendidikan dan derajat hidup perempuan menjadi salah satu sumber berbagai isu di Kota Bekasi seperti pelecehan, KDRT, pernikahan usia dini, bahkan perceraian.

Gambar 1. 2 Data Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kota Bekasi Tahun 2018-2021



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, 2023

Merujuk pada data tersebut, indeks pemberdayaan gender di Kota Bekasi bergerak naik turun. Kondisi itu mengindikasikan bahwa pemberdayaan masyarakat bagi kaum perempuan yang diimplementasikan oleh pemerintahan setempat masih kesulitan dilaksanakan dengan optimal dan berkelanjutan. Maka perlu dioptimalkan kembali dan diperkuat dengan berbagai jenis agenda yang diimplementasikan melalui pemberdayaan perempuan.

Rendahnya tingkat pendidikan dan taraf kesejahteraan perempuan menjadi salah satu penyebab beragam isu di Kota Bekasi. Adapun rata-rata lama sekolah di Kota Bekasi mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2023 adalah 11,66 tahun. Adapun indeks pendidikan di Kota Bekasi pada tahun 2022 yaitu 77,79. Rendahnya tingkat pendidikan perempuan tidak hanya berdampak pada keterbatasan akses mereka terhadap peluang ekonomi dan pekerjaan, tetapi memperkuat struktur sosial yang membatasi peran mereka dalam masyarakat. Salah satu faktor utama yang memperburuk kondisi ini adalah budaya patriarki. Norma dan nilai yang menyempatkan laki-laki sebagai pemegang dominasi dalam keluarga dan masyarakat seringkali membatasi ruang gerak perempuan. Akibatnya, meskipun perempuan memiliki potensi yang sama, mereka acap kali menghadapi hambatan struktural yang menghalangi mereka untuk berkembang dan berpartisipasi secara penuh dalam pembangunan.

Budaya patriarki yang masih melekat dalam diri masyarakat membuat budaya tersebut membatasi gerak para perempuan untuk ikut memberikan sumbangsih di lingkungan masyarakat yang bisa mengakibatkan seorang istri menggantungkan hidupnya kepada sang suami sehingga para wanita yang telah menikah tak berkuasa

apabila tidak ada kehadiran sang suami, berangkat dari kejadian tersebut menjadikan sang suami memiliki kekuatan untuk bersikap terhadap istri sesuai kehendaknya. Hal tersebut menjadi pemicu utama timbulnya tindak kekerasan dan perceraian.

Berdasarkan data yang diperoleh dari detikcom. (2023, 11 Februari), Terhitung selama tahun 2022 tercatat terdapat 7 kasus kekerasan atas anak dan perempuan di Kota Bekasi. Namun pada tahun 2021 terdaftar sebanyak 97 kasus dan pada tahun 2020 sebanyak 149 kasus. (*detikcom*, 2023). Data kekerasan yang dilaporkan dan ditangani oleh Dinas PPPA Kota Bekasi bekerjasama dengan para stakeholder yang ada adalah sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Rekapitulasi Data Kekerasan Terhadap Perempuan Kota Bekasi Per Tahun

No	Unit	Kasus yang ditangani	Tahun			
			2018	2019	2020	2021
1.	PPA Polres Bekasi	a. Kekerasan Fisik	131	182	118	142
		b. Psikis	7	3	1	2
		c. Penelantaran Rumah Tangga	11	20	2	12
		Jumlah	149	205	121	156
2.	DPPPA Kota Bekasi	a. Kekerasan Fisik	19	18	21	12
		b. Kekerasan Psikis	16	30	29	27
		c. Penelantaran Rumah Tangga	16	9	12	5

<i>Jumlah</i>	51	57	62	44
<i>Perempuan Sebagai Korban</i>	197	258	179	200
Total	200	262	183	200

Sumber : Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kota Bekasi, 2023

Sesuai dengan data yang tertera, terlihat bahwasanya kasus kekerasan fisik mendominasi laporan yang ditangani oleh unit PPA Polres Bekasi dan DPPPA Kota Bekasi. Meskipun terjadi fluktuasi dalam jumlah kasus setiap tahun, umumnya menunjukkan peningkatan total kasus dari 200 kasus pada tahun 2018 menjadi menjadi 262 pada tahun 2019. Kekerasan fisik menjadi jenis kekerasan yang paling sering dilaporkan, diikuti oleh kekerasan psikis dan penelantaran rumah tangga. Data ini menggarisbawahi perlunya perhatian dan tindakan yang berkelanjutan sebagai usaha pencegahan kekerasan terhadap perempuan di Kota Bekasi.

Tindak kekerasan, terutama terhadap perempuan dan anak merupakan fokus utama dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mendapatkan arahan dari Presiden Republik Indonesia untuk menyelesaikan lima isu prioritas dalam periode 2020-2024, yaitu: “(1) Peningkatan pemberdayaan kewirausahaan yang berspektif gender, (2) Peningkatan peran ibu dan keluarga dalam pendidikan/pengasuhan anak, (3) Penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak, (4) Penurunan pekerja anak, dan (5) Pencegahan perkawinan anak”. (*Kemenpppa.go.id*, 2023)

Tak hanya kasus kekerasan saja yang terjadi. Sepanjang tahun 2022, terdapat 41 kasus Pernikahan usia dini melalui pengajuan dispensasi kawin. Alasan pengajuan dispensasi kawin cukup beragam mulai dari faktor ekonomi, dijodohkan hingga hamil di luar nikah (*TribunJakarta.com*, 2024). Sementara untuk tingkat perceraian di Kota Bekasi sepanjang tahun 2022 mencapai 3.957 perkara. Faktor penyebab perceraian berkaitan dengan masalah perselisihan, ekonomi, orang ketiga, dan meninggal dunia (*TribunJakarta.com*, 2024).

Kelurahan Mustikasari merupakan salah satu Kelurahan yang ditunjuk oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi untuk melaksanakan program pemberdayaan perempuan.

Tabel 1. 2 Data Kemiskinan Kelurahan Mustikasari

Data Kemiskinan Kelurahan Mustikasari		
2021	2022	2023
814	814	1.396

Sumber : Kelurahan Mustikasari, 2024

Berdasarkan data di atas, terlihat bahwa angka penduduk miskin meningkat secara signifikan. Pada tahun 2021 dan 2022, jumlah penduduk miskin tercatat sebanyak 814 orang. Namun, pada tahun 2023, jumlah ini meningkat drastis menjadi 1.396 orang. Data ini menunjukkan adanya kenaikan jumlah penduduk miskin di Kelurahan Mustikasari, yang membutuhkan perhatian dan upaya penanganan lebih lanjut untuk mengurangi angka kemiskinan di wilayah tersebut.

Tingkat kemiskinan yang masih tinggi tersebut mengakibatkan Kelurahan Mustikasari menjadi daerah perkampungan yang masih terbelakang. Berdasarkan keadaan tersebut, diperlukannya program pemberdayaan perempuan. Pemberdayaan dapat diartikan sebagai penguatan, upaya untuk memperluas wawasan. Setiap masyarakat perlu mengetahui arti penting dan nilai-nilai positif dalam membangun warga negara khususnya perempuan. Pemberdayaan perempuan bertujuan untuk memberikan kendali dan akses terhadap sistem ekonomi, politik, sosial, dan budaya agar mereka dapat percaya diri dan berperan aktif dalam melakukan perubahan kehidupan sosial dan berbudaya. Pemberdayaan ini sendiri merupakan bagian dari usaha untuk memberikan pemerataan kesetaraan gender antara laki-laki dengan perempuan. Pemberdayaan ini ditujukan bukan untuk berarti membentuk perempuan menjadi lebih unggul dari laki-laki, tetapi untuk memenuhi hak-hak para perempuan agar tidak direndahkan baik secara lisan maupun tindakan.

Salah satu program pemberdayaan yang telah dijalankan di wilayah Jawa Barat adalah program Sekolah Perempuan Capai Impian dan Cita-Cita atau biasa dikenal dengan Sekoper Cinta. Program ini merupakan salah satu upaya untuk memberdayakan perempuan yang diluncurkan pada tahun 2018. Program ini diluncurkan sebagai alternatif dan usaha pencegahan terhadap masalah perceraian, kekerasan, pernikahan usia muda, eksploitasi manusia, kekurangan gizi, hingga pendidikan rendah di Provinsi Jawa Barat. Tujuan program ini sendiri adalah untuk mengembangkan individu melalui berbagai cara diberbagai bidang demi memajukan pengetahuan, keterampilan dan kemampuan seorang perempuan. Program ini memiliki tujuan untuk memajukan

kesejahteraan perempuan dengan tujuan peran serta perempuan bisa lebih dihargai di dalam rumah tangga serta dapat menyertakan diri dalam proses pembangunan nasional. Program ini hadir untuk menjadi sarana perempuan untuk terus menerus memperluas dan mengasah kemampuan, wawasan serta kecakapan untuk mendukung kondisi ekonomi keluarga, meningkatkan taraf hidup perempuan dalam kehidupan keluarga, mendorong terwujudnya keluarga yang sejahtera serta dapat menerapkan pola asuh yang terbaik demi masa depan anak.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi menunjuk Kelurahan Mustikasari untuk melaksanakan program Sekoper Cinta ini. Alasan terpilihnya kelurahan ini karena di wilayah Kelurahan Mustikasari masih terdapat masalah kesejahteraan seperti tingkat ekonominya masih rendah, daerah perkampungannya masih terbelakang dan tingkat kekerasan yang turun-naik setiap tahunnya. Program ini berfokus untuk memberikan peningkatan peran perempuan lebih khusus kepada ibu rumah tangga dengan memberikan pendidikan keterampilan yang ditentukan oleh modul dasar pembelajaran yang berisi enam pembahasan, yakni peningkatan kesejahteraan keluarga, keterampilan dasar bagi perempuan, kesehatan dan gizi rumah tangga, potret diri perempuan, dan tanggap darurat bencana. Program ini memberikan pemberdayaan perempuan dalam upaya meningkatkan keahlian dalam mengatur aspek-aspek yang berhubungan dengan penguatan kesejahteraan rumah tangga. Program Sekoper Cinta memberikan pendidikan keterampilan ditujukan kepada Ibu Rumah Tangga sehingga diharapkan mampu meningkatkan kapasitasnya secara

maksimal sebagai bagian dari rakyat yang terampil dan ahli khususnya untuk memajukan kualitas hidup keluarganya.

Dalam pelaksanaannya, program ini membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, organisasi masyarakat, sektor swasta, komunitas lokal, serta universitas. Oleh karena itu, pendekatan *Collaborative Governance* menjadi relevan dalam memastikan program ini berjalan secara efektif dan berkelanjutan. Namun, implementasi *Collaborative Governance* dalam Sekoper Cinta tidaklah mudah karena menghadapi beberapa tantangan, salah satunya kurangnya keterlibatan efektif dari berbagai aktor. Selain itu, rendahnya partisipasi perempuan dalam program, dimana masih banyak peserta yang tidak mendapatkan akses dan informasi mengenai program ini. Hal ini dapat terjadi karena di beberapa wilayah mengalami kendala akses informasi dan partisipasi, terutama di daerah dengan infrastruktur komunikasi yang kurang memadai.

Berdasarkan data sekunder yang didapatkan menyatakan bahwa program Sekoper Cinta ini perempuan diberdayakan untuk menghasilkan sebuah produk dapat berupa roti dan jajanan rumahan yang nantinya akan dijual. Namun terdapat kendala pada saat pemasaran dimana terkadang produk yang sudah jadi tersebut tidak jelas pemasarannya karena tidak ada wadah yang menangani urusan tersebut. Hal ini menandakan bahwa proses kolaborasi belum berjalan secara optimal dari sektor swasta dalam program pemberdayaan Sekolah Perempuan Capai Impian dan Cita-Cita. Keterlibatan sektor swasta dalam program Sekolah Perempuan Capai Impian dan Cita-Cita sampai saat ini belum berperan dengan baik. Keterlibatan dari pihak yang memiliki

kepentingan dalam menangani masalah ini dapat membuat program pemberdayaan perempuan berjalan lebih optimal.

Pemberdayaan perempuan tidak bisa dilaksanakan hanya dengan mengandalkan keterlibatan pemerintah saja, karena kapasitas pemerintah terbatas. Keberhasilannya sangat bergantung pada keterlibatan para stakeholder, termasuk organisasi masyarakat, sektor swasta, akademisi, serta individu yang menjadi sasaran program itu sendiri. Di sinilah konsep *Collaborative Governance* menjadi relevan, karena model tata kelola ini menekankan pentingnya kerja sama antara sektor publik dan non publik dalam perencanaan, implementasi, serta evaluasi kebijakan.

Pemberdayaan perempuan memerlukan peran berbagai aktor, konsep *Collaborative Governance* bisa menjadi alternatif dalam program pemberdayaan perempuan di Kota Bekasi terutama di Kelurahan Mustikasari. Syaiful dalam (Rofi dkk, 2020) mengartikan *Collaborative Governance* adalah model pembagian kapasitas dan potensi antar pemerintah, stakeholder, dan badan atau organisasi publik lainnya dengan tekad untuk memberdayakan bagi stakeholder yang terlibat yang lebih tidak berdaya sehingga mereka saling tergantung satu sama lain ketika menghadapi isu-isu yang kompleks dengan cara pengambilan keputusan yang disepakati bersama dan pelaksanaan yang berlandaskan konsensus. *Collaborative Governance* adalah model tata kelola pemerintahan yang mencakup berbagai pihak yang berkepentingan dalam pembangunan. Partisipasi semua pihak yang berkepentingan dengan maksud untuk mengoptimalkan kualitas pengambilan keputusan pemerintah dan mencegah konflik dalam proses pembangunan.

Hingga saat ini belum ditemukan adanya kajian ilmiah mengenai proses *Collaborative Governance* yang dilaksanakan pemerintah Kota Bekasi termasuk di lokasi binaan Kelurahan Mustikasari terhadap pemberdayaan perempuan melalui program Sekolah Perempuan Capai Impian dan Cita-Cita. Berdasarkan latar belakang tersebut, tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan proses *Collaborative Governance* dalam program pemberdayaan perempuan melalui program Sekolah Perempuan Capai Impian dan Cita-Cita di Kelurahan Mustikasari, Kota Bekasi dan mendeskripsikan faktor pendorong dan faktor penghambat proses *Collaborative Governance* dalam program pemberdayaan perempuan melalui program Sekolah Perempuan Capai Impian dan Cita-Cita di Kelurahan Mustikasari, Kota Bekasi.

1.2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini mencakup:

1. Bagaimana *collaborative governance* pada program Sekolah Perempuan Capai Impian dan Cita-cita (Sekoper Cinta) di Kelurahan Mustikasari Kota Bekasi dalam mengentaskan kemiskinan?
2. Apa faktor penghambat dan pendorong *collaborative governance* pada program pemberdayaan perempuan Melalui Sekolah Perempuan Capai Impian dan Cita-cita (Sekoper Cinta) di Kelurahan Mustikasari Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi?

1.3. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan dan memahami *Collaborative Governance* yang dilakukan Pemerintah Kota Bekasi dengan Sektor Swasta dan Masyarakat dalam

pemberdayaan perempuan melalui program Sekolah Perempuan Capai Impian dan Cita-cita.

2. Untuk mendeskripsikan faktor pendorong dan penghambat *Collaborative Governance* yang dilalui dalam program pemberdayaan perempuan melalui program Sekolah Perempuan Capai Impian dan Cita-cita.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara teori maupun aplikasi, sebagai berikut:

1.4.1. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan untuk menyediakan kontribusi ilmiah pada penelitian tentang *collaborative governance* dalam pemberdayaan masyarakat terutama perempuan. Penelitian sebelumnya mengenai program Sekolah Perempuan Capai Impian dan Cita-cita belum memfokuskan pada kerja sama pemerintahan, jadi penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan referensi baru tentang konsep kerja sama pemerintahan dan pemberdayaan perempuan.

1.4.2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberi manfaat bagi pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam memaksimalkan proses pemberdayaan perempuan terutama pada program Sekolah Perempuan Capai Impian dan Cita-cita. Disamping itu, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi kepada pemerintahan setempat.

1.5. Penelitian Terdahulu

Tabel 1. 3 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti/Tahun/Jurnal	Tujuan Penelitian	Metode	Hasil Penelitian
1.	Lilie, dkk/2021/Jurnal Litbang Provinsi Jawa Tengah	Untuk memahami penerapan <i>Collaborative Governance</i> yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Maron, Dinas Sosial Kabupaten Wonosobo, Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, KSM Tali Kasih dan pihak swasta, yaitu komunitas lokal, dalam upaya pemberdayaan masyarakat difabel.	Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif.	Temuan penelitian menunjukkan bahwa <i>Collaborative Governance</i> dalam pemberdayaan masyarakat difabel belum dilaksanakan secara optimal.
2.	Sujatmiko, dkk/2023/Jurnal Pemerintahan dan Politik	Untuk menggali sejauh mana pemberdayaan masyarakat melalui analisis terhadap penerapan <i>collaborative governance</i> dalam program desa berdaya di Desa Bligo, Kabupaten Magelang.	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus.	Temuan penelitian mengungkapkan bahwa pelaksanaan program desa berdaya berhasil melalui serangkaian diskusi antara berbagai pihak yang saling mempercayai.
3.	I Kade Adhi, dkk/2023/Journal Of Social Science Research	Untuk menganalisis aspek proses kolaborasi dengan menggunakan teori Ansell dan Gash serta menggambarkan faktor-faktor yang mendukung dan	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif	Temuan penelitian kolaborasi menunjukkan bahwa kolaborasi yang dilakukan masih kurang efisien, yang

No	Peneliti/Tahun/Jurnal	Tujuan Penelitian	Metode	Hasil Penelitian
		menghambat penerapan Collaborative Governance.		dapat dilihat dari tahap kondisi awal.
4.	Handoko, dkk/2022/Jurnal Adhikari	Untuk mengetahui penerapan collaborative governance dalam pengembangan usaha yang terintegrasi.	Metode penelitian yang digunakan yakni kualitatif deskriptif	Hasil penelitian mengungkapkan bahwa penerapan collaborative governance dalam pengembangan kewirausahaan terpadu dilaksanakan oleh –aktor aktor seperti Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Satuan Pelaksana Perindustrian Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan, Satuan Pelaksana Sosial, serta bBank DKI.
5.	Wewen Kusumi/2022/Jurnal Ilmu Administrasi Negara	Untuk menganalisis langkah-langkah yang diambil pemerintah daerah dengan menerapkan konsep <i>Collaborative Governance</i> dalam pemberdayaan perempuan.	Pendekatan penelitian yang diterapkan adalah metode kualitatif deskriptif	Temuan penelitian ini menyatakan bahwa upaya kolaborasi dirasa cukup berhasil membuat perempuan lebih berdaya, mandiri secara ekonomi dan sehat psikologis.

No	Peneliti/Tahun/Jurnal	Tujuan Penelitian	Metode	Hasil Penelitian
6.	Rahma Putri, dkk/2021/Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA	Untuk mendeskripsikan peran antar stakeholders yang terlibat dalam program pemberdayaan masyarakat.	Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah kualitatif.	Temuan penelitian ini menyimpulkan bahwa kolaboratif antar stakeholders dalam pemberdayaan masyarakat akan menghasilkan kontribusi nyata dalam penanggulangan kemiskinan nasional.
7.	Sita Agung, dkk/2023/Populasi	Untuk membahas tentang Collaborative Governance dalam pelaksanaan program Desa-Preneur di Desa Sidoarum, Yogyakarta	Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif.	Ditemukan dalam penelitian bahwa indikator collaborative governance belum sepenuhnya dilaksanakan.
8.	Farah Fatika/2022/International Journal of Social Sciences Review	Untuk mendeskripsikan proses collaborative governance pada program Kelompok Wanita Tani.	Pendekatan yang digunakan berbasis kualitatif	Dari temuan penelitian, terlihat bahwa proses collaborative governance belum terdistribusi secara merata pada program KWT di Cilegon
9.	Sanneke, dkk/2022/BMC Public Health	Untuk menganalisis karakteristik collaborative governance mana yang mendorong dan menghambat proses kolaborasi.	Metode yang dipilih bersifat kualitatif.	Berdasarkan temuan penelitian, dapat disimpulkan bahwa studi kasus ini berkontribusi

No	Peneliti/Tahun/Jurnal	Tujuan Penelitian	Metode	Hasil Penelitian
				pada literatur yang sudah ada tentang collaborative governance yang menambah kesenjangan pengetahuan tentang tata kelola pendekatan kesehatan masyarakat.
10.	Muhammad Ammar/2019/Jurnal Studi Pemerintahan	Untuk mengkaji penerapan tata kelola kolaboratif dalam strategi pengarusutamaan gender di Kota Yogyakarta	Pendekatan penelitian yang dipakai adalah kualitatif.	Temuan penelitian ini mengungkapkan bahwa tata kelola kolaboratif dalam pengarusutamaan gender yang dilaksanakan oleh pemerintah kota Yogyakarta masih dalam kondisi yang terbatas.

Berdasarkan tabel penelitian di atas, penelitian terdahulu mengenai *Collaborative Governance* dalam program pemberdayaan masyarakat/perempuan sudah berjalan dengan baik. Dalam penelitian terdahulu belum ditemukan adanya kajian ilmiah mengenai proses *Collaborative Governance* yang dilaksanakan pemerintah Kota Bekasi termasuk di lokasi binaan Kelurahan Mustikasari terhadap pemberdayaan perempuan melalui program Sekolah Perempuan Capai Impian dan Cita-Cita. Maka dari itu, pembeda dari penelitian ini dibandingkan dengan

penelitian sebelumnya yaitu dalam penelitian ini berfokus pada proses kolaboratif terhadap program Sekolah Perempuan Capai Impian dan Cita-Cita di Kelurahan Mustikasari Kota Bekasi.

1.6. Kerangka Teoritis

1.6.1. Administrasi Publik

Administrasi Publik adalah proses penyusunan dan pelaksanaan kebijakan oleh birokrasi dalam skala yang luas demi kepentingan masyarakat umum. Pengertian administrasi publik dapat berbeda-beda tergantung pada pandangan individu terhadap istilah "administrasi publik." Dalam buku 6 Dimensi Strategis Administrasi Publik oleh Prof. Dr. Yeremias T. Keban, Ada tiga interpretasi yang umum dikenal terkait dengan konsep ini:

a. Administration of Public

Administration of Public mendefinisikan bahwa pemerintah bertindak sebagai pengelola tunggal yang memegang kekuasaan atau sebagai regulator yang aktif dan selalu aktif mengambil inisiatif dalam mengelola atau menjalankan tindakan dan prakasa. Dalam hal ini, masyarakat dianggap sebagai pihak yang pasif dalam peranannya, kurang mampu; oleh karena itu, mereka harus patuh dan menuruti aturan yang ditetapkan oleh pemerintah.

b. Administration for Public

Administration for Public merupakan istilah yang menunjukkan bahwa pemerintah memegang peran yang lebih signifikan dalam mencapai misinya untuk memberikan pelayanan publik. Pemerintah juga lebih peka dan tanggap

terhadap kebutuhan masyarakat dan lebih memahami cara terbaik untuk memberikan pelayanan publik untuk kepentingan masyarakat.

c. Administration by Public

Administration by Public merupakan istilah di mana pemerintah mengutamakan pemberdayaan masyarakat dengan memprioritaskan kemandirian dan keterampilan masyarakat karena pemerintah menawarkan peluang kepada mereka untuk melakukannya. Dengan kata lain, pemerintah berusaha untuk menyediakan fasilitas agar orang dapat mengatur kehidupannya sendiri tanpa bergantung pada pemerintah. Sementara pemerintah memainkan perannya sebagai fasilitator, masyarakat dapat ikut meningkatkan partisipasinya.

Menurut Dwight Waldo (1967), administrasi publik adalah sebuah entitas yang melibatkan organisasi, manajemen sumber daya manusia, dan penggunaan peralatan demi mencapai sasaran pemerintah. Sementara menurut Woodrow Wilson (1997), administrasi publik adalah praktik yang dilaksanakan oleh pemerintah dengan maksud untuk menjalankan tugas-tugas publik dengan efisiensi dan sejalan dengan aspirasi rakyat. Dengan demikian, administrasi publik merupakan usaha pemerintah untuk menyediakan keperluan masyarakat yang terkait dengan fungsi pemerintah.

1.6.2. Paradigma Administrasi Publik

Menurut Kuhn (1970) dalam (Astuti, 2020), Paradigma adalah suatu perspektif, nilai-nilai, metode-metode, prinsip dasar, atau pendekatan untuk

mengatasi masalah yang dipegang oleh kalangan akademis pada kurun waktu tertentu. Ilmu Administrasi Publik mengalami perkembangan. Menurut Nicholas Henry (1995) dalam (Astuti, 2020), terjadi pergeseran menjadi lima paradigma dalam administrasi negara, yakni:

Paradigma 1 (1990-1926) – *Administration Dichotomy*. Dalam paradigma ini menyatakan bahwa politik mesti fokus terhadap kebijakan atau cerminan dari suara rakyat, sedangkan administrasi menaruh perhatian khusus pada pengimplementasian dari kebijakan atau aspirasi tersebut. Di dalam kerangka paradigma ini hanya berfokus pada lokusnya saja yaitu birokrasi pemerintahan.

Paradigma 2 (1927-1937) – *The Principles of Administration*. Dalam paradigma ini dikenalkan prinsip dasar administrasi sebagai fokus administrasi publik. Prinsip-prinsip tersebut yakni *Planning, Organizing, Staffing, Directing, Coordinating, Reporting*, dan *Budgeting*. Fokus tersebut bersifat menyeluruh yang dapat digunakan di mana saja. Sedangkan lokusnya tidak diterangkan dengan jelas karena prinsip-prinsip tersebut bisa diterapkan dimana saja termasuk di organisasi pemerintah.

Paradigma 3 (1950-1970) – *Public Administration as Political Science*. Dalam paradigma ini, administrasi negara bukannya *value free* atau bisa diterapkan di mana saja, meski begitu, justru selalu terikat oleh nilai-nilai tertentu. Paradigma ini lokusnya adalah birokrasi pemerintah, sementara

fokusnya menjadi tidak jelas karena prinsip-prinsip administrasi publik menyimpan banyak kelemahan.

Paradigma 4 (1946-1970) – *Public Administration as Management*. Dalam kerangka paradigm ini, prinsip-prinsip manajemen sempat dianut sebelumnya dikaji secara mendalam dan sistematis. Paradigma ini memusatkan perhatian pada pengembangan ilmu administrasi murni berlandaskan pada disiplin psikologi sosial, dan juga berkaitan dengan kebijakan publik. Fokusnya bisa diaplikasikan tidak hanya di dunia bisnis melainkan juga dalam administrasi publik. Sehingga lokusnya tidak lagi jelas..

Paradigma 5 (1970-Sekarang) – *Public Administration as Public Administration*. Paradigman ini memiliki sasaran dan ruang lingkup yang jelas. Dimana fokus administrasi publik dalam paradigma ini adalah teori organisasi, teori manajemen, dan kebijakan publik. Sedangkan lokusnya adalah isu-isu publik dan kepentingan umum.

Paradigma 6 (1990-Sekarang) – *Governance*. Menurut Tamayao (2014) dalam Astuti, 2020), Governance didefinisikan bahwa pemegang kewenangan atau kekuasaan yang diberikan pemimpin politik untuk meningkatkan kesejahteraan warga negara, sistem ini melibatkan proses yang rumit dimana beberapa sektor masyarakat memiliki kewenangan untuk mengeluarkan dan mengimplementasikan kebijakan publik yang secara langsung mempengaruhi perkembangan ekonomi dan sosial. Sementara sektor pemerintah mengatur dan

mengarahkan, pemerintahan membutuhkan sektor lain untuk menyediakan layanan. Pada dasarnya, pemerintah melibatkan kerjasama antara individu di tingkat lokal, kelompok masyarakat, sektor publik dan sektor swasta. *Governance* percaya bahwa partisipasi pemangku kepentingan perlu diintegrasikan dalam proses pengambilan keputusan.

1.6.3. Good Governance

United Development Programme (UNDP) mendefinisikan *good governance* sebagai penyelenggaraan kekuasaan ekonomi, politik, dan administratif untuk mengurus hal-hal kenegaraan di semua lapisan dan alat yang digunakan untuk meningkatkan persatuan sosial, integrasi, serta kesejahteraan penduduk. Menurut UNDP, *good governance* merujuk pada rangkaian mekanisme, proses, relasi, dan institusi yang rumit di mana warga negara dan kelompok-kelompok berpartisipasi dalam menyampaikan kepentingan mereka, menjalankan hak dan tanggung jawab mereka, serta menyelesaikan perbedaan mereka.

Good Governance didefinisikan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) sebagai proses menjalankan kekuasaan negara untuk menyediakan barang dan jasa publik. LAN juga mengatakan bahwa dari perspektif fungsional, pemerintahan dapat dievaluasi untuk melihat apakah pemerintah berhasil mencapai tujuan atau sebaliknya. Menurut LAN, kualitas pemerintahan yang baik memiliki dua definisi. Pertama, prinsip-prinsip yang membantu rakyat mencapai tujuan nasional seperti keadilan sosial, kemandirian, dan

pembangunan berkelanjutan. Kedua, komponen fungsional dari pemerintahan yang berfungsi dengan baik dan efisien dalam rangka meraih tujuan tersebut. Menurut LAN, *good governance* adalah pemerintahan negara yang kuat, *accountable*, dan sukses dengan menjalin hubungan yang saling mendukung antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. UNDP menyimpulkan bahwa sistem tata kelola pemerintahan yang baik adalah partisipatif, yang mengimplikasikan bahwa seluruh anggota lembaga pemerintahan memiliki suara dalam mempengaruhi pengambilan keputusan.

Menurut World Bank, *Good governance* menekankan pentingnya pelayanan publik yang optimal, sistem peradilan yang kredibel, dan pengelolaan pemerintahan yang akuntabel. Sesuai dengan pandangan Gerald Meier, *good governance* adalah prinsip pengelolaan pemerintahan yang memfasilitasi penyediaan layanan publik bekerja dengan baik, sistem pengadilan dapat diandalkan, administrasi bertanggung jawab kepada masyarakat, dan mekanisme pasar diutamakan dalam proses mencapai kepuasan publik.

1.6.4. Collaborative Governance

Menurut Ansell dan Gash (2008), *Collaborative Governance* adalah serangkaian pengelolaan yang melibatkan satu atau lebih instansi publik dan melibatkan pihak-pihak yang memiliki kepentingan "non-negara" langsung dalam tahapan pembuatan kebijakan formal. Pengaturan ini dirancang untuk mencapai tujuan membuat atau menerapkan kebijakan pemerintah atau

menyelenggarakan program atau sumber daya yang dimiliki oleh masyarakat umum.

Menurut Robertson dan Choi dalam (Astuti, 2020), (Rahayu, 2022) mendefinisikan *Collaborative Governance* adalah proses yang adil dan kolektif di mana dalam hal ini setiap individu memiliki peluang yang setara untuk membuat keputusan diambil dengan memperhatikan setiap pihak yang memiliki kepentingan, dan setiap pemangku kepentingan mendapat peluang yang setara untuk mengungkapkan pendapatnya.

Kolaborasi yang dijalankan oleh pemerintah dengan lembaga di luar pemerintah ada berbagai macam, antara lain:

- a. Kerjasama di antara bagian-bagian dalam pemerintahan itu sendiri.
- b. Kerjasama antara sektor publik dan sektor bisnis/dunia usaha (swasta/privat).
- c. Kerjasama antara sektor publik dan organisasi sosial masyarakat.

Ansell dan Gash merumuskan model *Collaborative Governance* berdasarkan tinjauan literatur. Hasil tinjauan ini mengidentifikasi empat faktor utama, yaitu: (1) Kondisi awal; (2) Desain lembaga; (3) Kepemimpinan; dan (4) Proses kolaboratif.

1. Kondisi Awal

Kondisi awal merupakan keadaan saat para pemangku kepentingan dipengaruhi oleh kondisi awal kerja sama. Kondisi awal menentukan sebelum

terjalinnya proses kolaborasi, dalam keadaan tertentu dapat menjadi pendorong atau penghambat kerja sama antara stakeholder. Terdapat tiga kondisi awal, antara lain:

- a. Kesenjangan antara kekuatan, kapabilitas, sumber daya, dan pengetahuan dari pihak-pihak yang memiliki kepentingan.
- a. Sejarah kerja sama atau konflik sebelumnya di antara pemangku kepentingan.
- b. Motivasi dan hambatan untuk berkolaborasi.

2. Desain Kelembagaan

Desain kelembagaan merujuk pada pengaturan regulasi dasar yang mengatur kerja sama. Aspek ini sangat menentukan karena berfungsi sebagai legitimasi formal dalam proses kolaborasi. Hal yang ditekankan adalah bagaimana forum dibuat, bagaimana aturan main untuk kolaborasi, bagaimana pedoman pelaksanaan yang jelas dan metode untuk memastikan transparansi dalam pelaksanaan proses.

3. Kepemimpinan

Selama proses kolaborasi besar kemungkinan akan terjadi atau ditemukannya sebuah konflik, perselisihan dan ketidakpercayaan antara pemangku kepentingan. Untuk menghindari hal ini, kepemimpinan yang diterima dan memiliki kepercayaan dari semua pihak yang memiliki kepentingan diperlukan. Kepemimpinan yang kuat yakni dihargai dan diakui oleh stakeholder akan menjadi elemen penting dalam proses kolaborasi karena akan

memungkinkan kolaborasi tersebut berhasil. Kepemimpinan yang kuat sering kali berasal dari kalangan stakeholder itu sendiri. .

4. Proses Kolaboratif

Awal dari proses kolaborasi sangat sulit ditentukan akan dimulai darimana. Ada 5 proses kolaboratif, antara lain:

a. Dialog tatap muka

Dialog ini sebagai langkah dalam sebuah proses yang melahirkan kesepakatan. Dialog ini bertujuan untuk menemukan peluang dengan menitikberatkan pada gagasan bahwa kerja sama akan memberikan keuntungan bagi para pemangku kepentingan.

b. Membangun kepercayaan

Membangun kepercayaan adalah bagian yang tak terpisahkan dari dialog. Pihak-pihak yang berperan dalam proses kolaborasi harus mampu membangun kepercayaan. Proses ini memakan waktu yang panjang dan memerlukan komitmen yang kuat.

c. Komitmen dalam proses kolaborasi.

Adanya kondisi saling bergantung yang erat antara stakeholder memungkinkan untuk memperkuat komitmen untuk berkolaborasi. Kolaborasi bukanlah kesepakatan yang terjadi satu kali namun merupakan serangkaian kegiatan kerjasama yang terus berlangsung dan memberikan keuntungan.

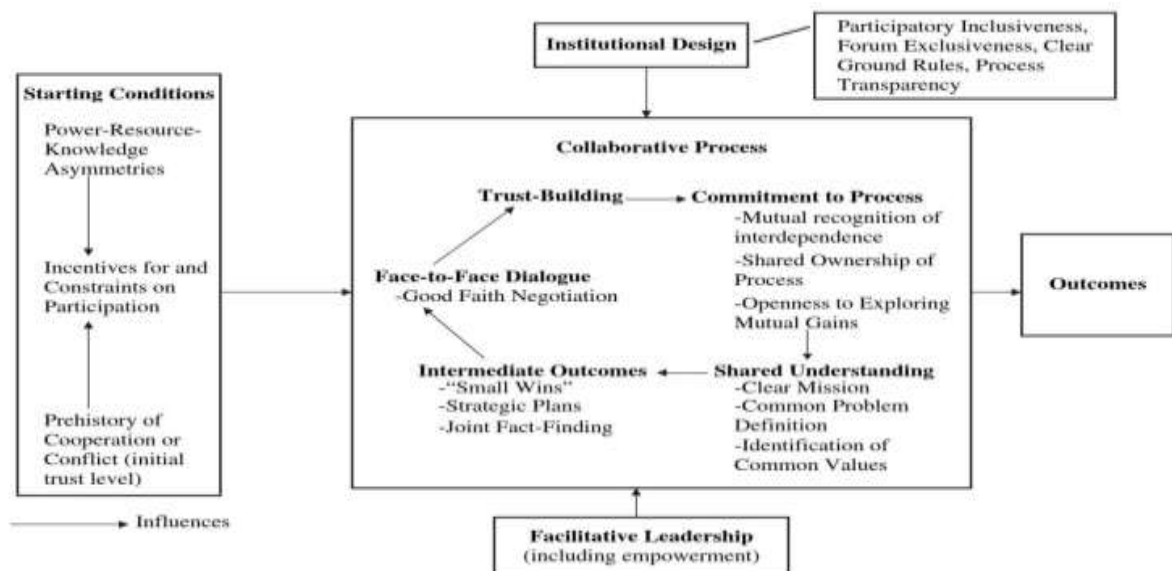
d. Pemahaman bersama.

Pemahaman bersama ini bisa tercermin dengan adanya tujuan yang jelas untuk semua pihak, masalah yang dihadapi bersama juga telah dipahami dengan jelas, dan pemahaman yang sama tentang nilai yang akan diraih dalam proses kolaborasi.

e. Hasil sementara (pertengahan)

Kolaborasi memiliki peluang lebih besar untuk berkelanjutan ketika manfaat dan pencapaian dari kolaborasi dapat dirasakan secara nyata, meskipun kecil, sebagai hasil sementara dalam prosesnya. Hasil yang diperoleh ini dapat menjadi faktor utama dalam memperkokoh kepercayaan dan komitmen bersama para stakeholder.

Gambar 1. 3 Model Collaborative Governance Ansell dan Gash (2008)



Sumber: Retno Astuti (2020), *Collaborative Governance Dalam Perspektif Administrasi Publik*

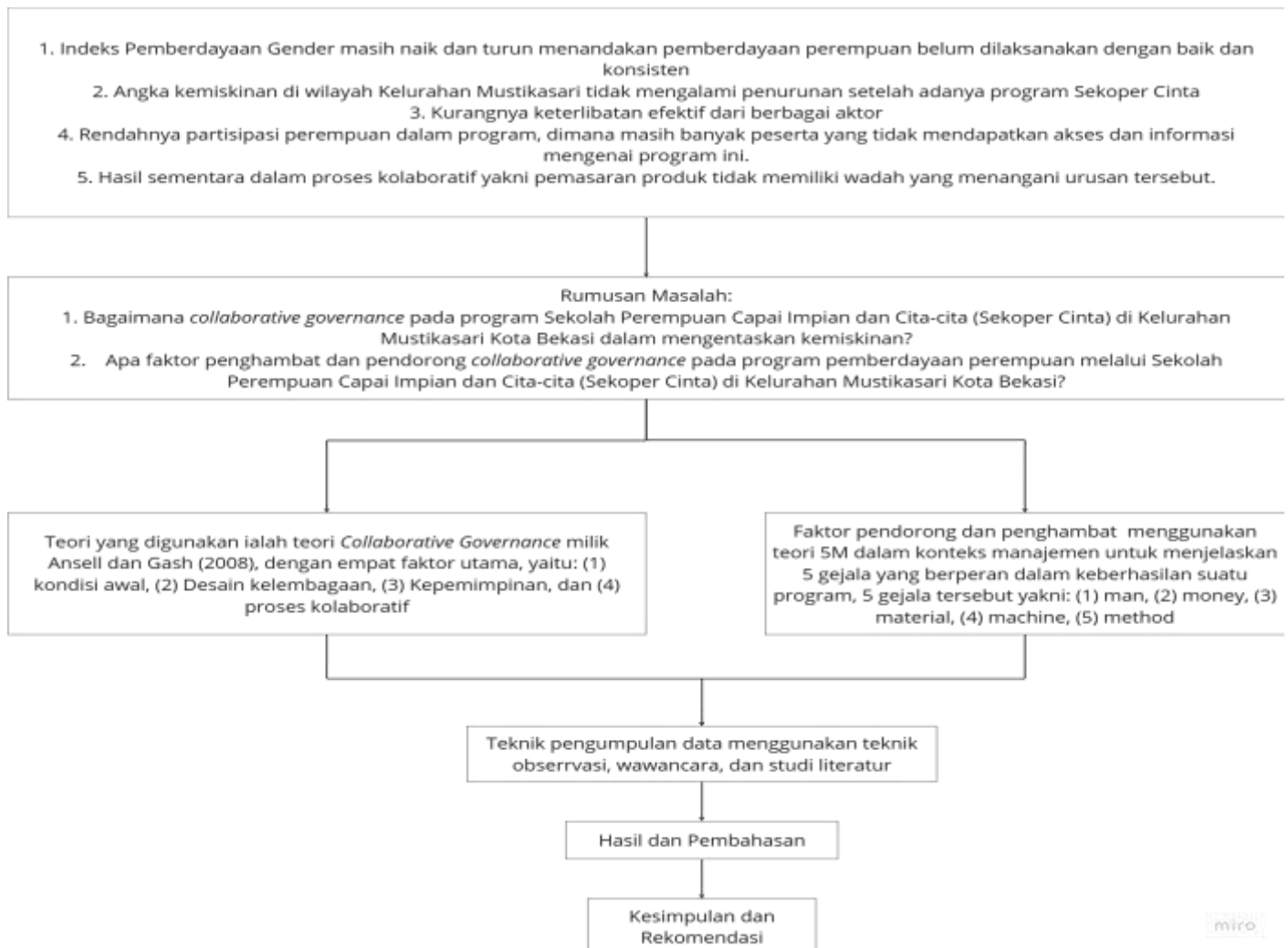
1.6.5. Pemberdayaan

Djohani (2003, dalam Margayaningsih, 2018) menyatakan bahwa pemberdayaan adalah sebuah proses untuk meningkatkan kekuasaan pihak yang kurang berdaya dan mengurangi kekuasaan pihak yang terlalu dominan, demi mencapai keseimbangan. Adapun menurut Rappaport (1984 dalam Margayaningsih, 2018) menyatakan bahwa pemberdayaan merupakan sebuah pendekatan yang memungkinkan rakyat, organisasi, dan komunitas memiliki kendali atas kehidupannya. Menurut Parsons (1994, dalam Margayaningsih, 2018), pemberdayaan mendorong individu untuk mengembangkan keterampilan, pengetahuan, dan pengaruh yang cukup guna menentukan arah kehidupannya serta memberikan dampak positif bagi orang lain. Selanjutnya menurut Ife (1995, dalam Margayaningsih, 2018), pemberdayaan merupakan usaha dalam menyediakan sumber daya, peluang, pengetahuan, dan keterampilan bagi masyarakat guna meningkatkan kapasitas diri mereka dalam menentukan masa depan, serta berperan aktif dan mempengaruhi lingkungan sosialnya..

Menurut Slamet (2003, dalam Alfitri, 2011), menitikberatkan bahwa esensi pemberdayaan terletak pada upaya menjadikan masyarakat mampu berkembang dan memperbaiki kehidupannya secara mandiri. Menurut Gunawan (2009, dalam Alfitri, 2011), menjelaskan bahwa pemberdayaan adalah sebuah aksi sosial dalam komunitas masyarakat, di mana mereka secara mandiri mengorganisasikan diri untuk merancang perencanaan dan tindakan bersama guna menyelesaikan permasalahan sosial atau memenuhi kebutuhan sosial

dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Menurut Widjayanti (2011, dalam Margayaningsih, 2018) menjelaskan bahwa permbudayaan bertujuan untuk membangkitkan potensi, membuka peluang, serta meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat agar mereka dapat menentukan arah masa depan yang lebih baik. Indikator pemberdayaan menurut Suharto (2011, dalam Margayaningsih, 2018), setidaknya terdapat empat aspek utama, yaitu bersifat terencana dan koletif, bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menempatkan kelompok rentan atau kurang beruntung sebagai priotitas, serta dijalankan dengan program untuk meningkatkan kapasitas.

1.6.6. Kerangka Berpikir



1.6.7. Operasionalisasi Konsep

Collaborative Governance merupakan suatu proses kolaboratif yang tidak hanya melibatkan berbagai pemangku kepentingan, tetapi juga menekankan keterbukaan, kesetaraan, dan partisipasi aktif dalam perumusan serta pelaksanaan kebijakan. Kolaborasi yang efektif dalam tata kelola pemerintahan tidak hanya bertujuan untuk menciptakan kebijakan yang lebih baik, tetapi juga membangun kepercayaan dan kemitraan yang kuat antar pemangku kepentingan dalam jangka panjang.

Terdapat 4 gejala yang Peneliti teliti, yakni:

1. Kondisi Awal, merupakan modal awal sebelum kolaborasi dimulai. Jadi sebelum beberapa pihak bisa bekerja sama terdapat sejarah kerja sama sebelumnya, alasan mengapa mereka mau kerja sama, dan tantangan yang mungkin akan membuat kerja sama menjadi sulit. Hal ini dilihat dari sejarah kerjasama dan bentuk dorongan serta kendala yang dihadapi pada *starting conditions*.
2. Desain Kelembagaan, merupakan aturan main dalam kerja sama. Semua pihak yang terlibat harus mengetahui apa yang menjadi tugasnya, apa batasan, serta bagaimana cara mengambil keputusan bersama. Hal ini dilihat dari ketersediaan kejelasan aturan dasar dan transparansi proses kolaboratif.
3. Kepemimpinan, bukan hanya mencakup siapa pemimpinnya tetapi juga bagaimana seseorang atau sekelompok orang bisa menjadi fasilitator

yang membuat kerja sama menjadi efektif. Hal ini dilihat dengan melalui ketersediaan fasilitas.

4. Proses Kolaboratif, merupakan bagaimana kerja sama berjalan secara efektif dari awal sampai akhir. Hal ini dilihat dengan adanya dialog tatap muka, adanya usaha membangun kepercayaan, adanya komitmen pada proses, adanya kesamaan pemahaman, serta hasil sementara.

Faktor pendorong dan penghambat *Collaborative Governance* didapat berdasarkan hasil temuan di lapangan. Peneliti membagi faktor tersebut ke dalam dua kualifikasi yakni faktor pendorong dan penghambat dengan menggunakan teori 5M dalam konteks manajemen untuk menjelaskan 5 gejala yang berperan dalam keberhasilan suatu program, 5 gejala tersebut yakni:

1. Man, mengacu pada faktor manusia yang memegang peran kunci dalam mengelola dan menjalankan suatu organisasi/program. Dalam hal ini yakni Sumber Daya Manusia.
2. Money, mengacu pada sumber daya keuangan yang diperlukan untuk mendukung kegiatan organisasi/suatu program. Dalam hal ini berupa anggaran atau pendanaan.
3. Material, mengacu pada bahan baku atau sumber daya fisik yang dibutuhkan dalam kegiatan organisasi/program. Dalam hal ini berupa sarana dan prasarana pendukung program dan teknologi informasi.

4. Machine, mengacu pada peralatan atau mesin yang digunakan dalam kegiatan organisasi/program. Dalam hal ini berupa teknologi dan sistem kerja.
5. Method, mengacu pada cara atau metode yang diterapkan dalam suatu proses atau kegiatan organisasi dan program. Dalam hal ini berupa struktur sosial, pengambilan keputusan, pembagian tugas, serta mekanisme koordinasi.

1.7. Argumen Penelitian

Penulis akan melakukan penelitian mengenai *Collaborative Governance* pada program Sekolah Perempuan Capai Impian dan Cita-Cita (Sekoper Cinta) di Kelurahan Mustikasari Kota Bekasi. Penulis memiliki ketertarikan untuk mengetahui lebih dalam mengenai *Collaborative Governance* pada program Sekolah Perempuan Capai Impian dan Cita-Cita (Sekoper Cinta) di Kelurahan Mustikasari Kota Bekasi dengan menggunakan indikator *Collaborative Governance* menurut Ansell dan Gash yakni Kondisi Awal, Kepemimpinan, Desain institusional. Dan proses kolaboratif. Selain itu penelitian ini juga menggunakan indikator faktor pendorong dan penghambat *Collaborative Governance* dengan menggunakan teori 5M dalam konteks manajemen.

1.8. Metode Penelitian

Metode penelitian ini disusun untuk menjawab pertanyaan utama dalam penelitian, yaitu bagaimana *Collaborative Governance* diterapkan dalam program Sekolah Perempuan Capai Impian dan Cita-Cita (Sekoper Cinta) di Kota Bekasi,

serta apa saja faktor pendorong dan penghambat dalam proses kolaborasi tersebut. Untuk menjawab pertanyaan ini, penelitian ini akan mengumpulkan data terkait mekanisme kerja sama antara pemerintah, fasilitator, dan peserta program, serta sejauh mana efektivitas program dalam memberdayakan perempuan. Data yang diperoleh mencakup aspek kebijakan, peran aktor, tantangan implementasi, serta dampak program. Dengan demikian, metode yang digunakan dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai *Collaborative Governance* dalam mendukung keberlanjutan program Sekoper Cinta.

1.8.1 Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut Harahap (2020) dalam (Dr. Muhammad Hasan, S.Pd., M.Pd., Dr. Tuti Khairani Harahap. et al., 2023), Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang bertujuan memahami dan menggambarkan realitas sosial dalam bentuk yang apa adanya, bukan berdasarkan pandangan ideal tentang apa yang seharusnya terjadi. Metode deskriptif menurut Sugiyono (2013), merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui nilai dari variable independen, baik satu maupun lebih. Penelitian ini memungkinkan pembangunan teori yang dapat menjelaskan, meramalkan, dan mengendalikan suatu gejala. Dengan menggunakan kekuatan dan kualitas serta struktur kalimat yang akurat, penelitian kualitatif menitikberatkan pada proses serta interpretasi dari hasilnya. Peneliti bertindak sebagai mesin dengan menggunakan metode pengumpulan data seperti wawancara dan analisis data induktif.

Penelitian ini bertujuan untuk menggali pemahaman yang lebih mendalam tentang *collaborative governance* yang dilakukan Pemerintah Kota Bekasi dengan masyarakat dalam program Sekolah Perempuan Capai Impian dan Cita-Cita (Sekoper Cinta) di Kelurahan Mustikasari Kota Bekasi.

1.8.2 Situs Penelitian

Situs penelitian ini adalah lokasi yang dipilih oleh peneliti untuk menggali informasi dan data yang dibutuhkan untuk mengungkap kebenaran tentang objek penelitian. Lokasi penelitian adalah Lokasi Binaan P2WKSS RW 01 Kelurahan Mustikasari, Kecamatan Mustikajaya, Kota Bekasi.

1.8.3 Subjek Penelitian

Subjek penelitian merujuk pada individu yang secara langsung terlibat dalam proses penelitian (informan atau narasumber) untuk mendapatkan informasi tentang data sampel penelitian (Sugiyono, 2013). Tujuan dari penelitian ini yaitu menganalisis *Collaborative Governance* antara pemerintah dan masyarakat dalam program Sekolah Perempuan Capai Impian dan Cita-cita (Sekoper Cinta) di Kelurahan Mustikasari, Kota Bekasi, serta menganalisis faktor yang mendorong dan menghambat dalam kerja sama tersebut.

Informan dipilih berdasarkan teknik *purposive sampling*. Selain itu, pemilihan informan juga mempertimbangkan aspek keterkaitan informan dengan topic dan program yang penulis ambil. Hal ini dilakukan agar data yang diperoleh lebih relevan dan mendalam sesuai dengan tujuan penelitian. Informan yang dipilih diharapkan

memiliki pengalaman, pemahaman, serta keterlibatan langsung dalam program yang dikaji, sehingga dapat memberikan wawasan yang lebih komprehensif.

Subjek penelitian mencakup:

1. Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bekasi
2. Kelurahan Mustikasari
3. Fasilitator
4. Masyarakat

1.8.4 Jenis Data

Data adalah bagian penting dari penelitian karena membantu peneliti dalam memahami hasil studi. Dalam melaksanakan penelitian ini, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang bersifat kualitatif. Data kualitatif adalah informasi yang berwujud dalam bentuk kata-kata atau lisan. Pengumpulan data kualitatif dapat dilakukan melalui teknik wawancara.

1.8.5 Sumber Data

Menurut Lofland sebagaimana yang dikutip Moleong dalam (Wahyuni, 2022), sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah ucapan, perilaku, sedangkan data tambahan mencakup dokumen dan berbagai sumber lainnya..

Peneliti mengumpulkan data dari dua jenis sumber yaitu data primer dan data sekunder:

1. Data Primer

Data primer secara khusus digunakan dalam rangka menjawab pertanyaan penelitian karena data penelitian ini diperoleh secara langsung dari sumber asli, baik itu individu maupun kelompok, tanpa melibatkan perantara. Penulis menggunakan metode survei dan observasi untuk mengumpulkan data primer. Pertanyaan dalam bentuk lisan dan tertulis digunakan dalam survei sebagai metode pengumpulan data primer. Penulis melakukan wawancara dengan Pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bekasi untuk mendapatkan data atau informasi yang diperlukan. Selain itu, penulis juga mengumpulkan data dengan metode observasi yang melibatkan pengamatan terhadap aktivitas dan peristiwa tertentu.

2. Data Sekunder

Data sekunder biasanya digunakan dalam penelitian untuk mendapatkan informasi tambahan atau melengkapi data yang sudah ada. Ini adalah jenis data yang telah disusun, dikumpulkan, atau diperoleh oleh orang lain atau peneliti sebelumnya untuk berbagai tujuan. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari sumber-sumber berikut: artikel, jurnal, dan publikasi pemerintah, serta sumber tambahan yang dapat mencakup dokumen, jurnal, dan buku yang diterbitkan pemerintah.

1.8.6 Teknik Pengumpulan

Teknik pengumpulan adalah langkah untuk menghimpun data atau informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. Pemilihan teknik pengumpulan data yang sesuai memiliki signifikansi penting dalam memastikan data yang diperoleh akurat dan relevan. Pada penelitian ini, teknik untuk mengumpulkan data yang dipakai, yaitu:

1. Observasi

Menurut Wijaya (2018, dalam Dr. Muhammad Hasan, S.Pd., M.Pd., Dr. Tuti Khairani Harahap. et al., 2023), observasi mengacu pada proses pengamatan yang dilakukan peneliti terhadap situasi penelitian, baik secara terbuka maupun dengan pendekatan yang terstruktur. Hasil observasi mencakup elemen seperti lokasi, orang yang terlibat, aktivitas, objek yang terlibat, tindakan yang diamati, peristiwa yang terjadi, serta waktu pengamatan..

Penelitian ini menggunakan observasi untuk mengetahui perilaku subjek dan makna dari perilaku dan aktivitas tersebut. Dalam penelitian ini, Peneliti akan mendapatkan gambaran dan informasi tentang Kerjasama pemerintah dengan masyarakat dalam program Sekolah Perempuan Capai Impian dan Cita-cita (Sekoper Cinta) menggunakan konsep *Collaborative Governance*.

2. Wawancara

Wawancara digunakan untuk memeriksa kembali atau memastikan kebenaran informasi yang telah didapatkan sebelumnya. Menurut R.A Fadhallah (2021, dalam Wahyuni, 2022), wawancara adalah bentuk interaksi komunikasi antara dua pihak atau lebih yang dapat berlangsung secara langsung, dengan satu pihak berperan sebagai pewawancara dan pihak lainnya sebagai responden guna mencapai tujuan tertentu. .

Peneliti menjalankan sesi wawancara secara langsung dengan pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bekasi, Kelurahan

Mustikasari, Fasilitator, dan Masyarakat. Peneliti menggunakan wawancara terstruktur untuk mendapatkan data untuk penelitian ini.

3. Studi Literatur

Studi literatur dalam penelitian ini bertujuan untuk memahami konsep, teori, serta penelitian terdahulu yang relevan dengan program Sekoper Cinta sebagai upaya pemberdayaan perempuan. Literatur yang dikaji mencakup pemberdayaan dan *collaborative governance* yang menjadi dasar dalam menganalisis bagaimana program ini diimplementasikan serta tantangan yang dihadapi. Dengan adanya studi literatur ini, diharapkan penelitian dapat memiliki landasan teoritis yang kuat dalam memahami peran serta dampak program Sekoper Cinta dalam meningkatkan kesejahteraan perempuan di Jawa Barat, khususnya di Kota Bekasi.

1.8.7 Analisis dan Interpretasi Data

Analisis data merupakan langkah dalam penelitian untuk menyusun dan mengolah data secara terstruktur sehingga dapat meningkatkan pemahaman peneliti mengenai kasus yang dikaji serta menyajikan temuan yang bermanfaat bagi pihak lain. Setelah analisis selesai, data diinterpretasikan untuk memberikan informasi yang bermanfaat bagi peneliti. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Miles dan Huberman. Berikut metode-metode yang digunakan untuk menganalisis data:

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah memilih data yang penting dari data yang tidak terlalu penting. Reduksi data dimulai sejak tahap pertama pengumpulan data. Seluruh data dapat direduksi sehingga mendapatkan data yang relevan dengan masalah penelitian. Selanjutnya, setelah pengumpulan data selesai peneliti secara bertahap melakukan reduksi, menyaring kembali data, dan merangkumnya untuk mendapatkan inti dari temuan di lapangan.

2. Penyajian Data

Proses penyajian data adalah proses dimana seluruh data yang telah diperoleh dan dihimpun oleh peneliti diolah dan disajikan dalam bentuk kalimat. Teknik penyajian data menyesuaikan dengan bentuk dan jenis data yang diperoleh dari lapangan.

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Kesimpulan baru bisa ditarik setelah data terkumpul sepenuhnya dan seluruh proses analisis, baik reduksi maupun penyajian telah dilakukan. Proses ini melibatkan peninjauan ulang terhadap keseluruhan data serta hasil analisis lainnya.. Dalam proses penarikan kesimpulan peneliti dapat berkontribusi pada pengembangan ilmu dengan menghasilkan teori baru, memperkuat teori yang telah ada, atau melakukan penyempurnaan terhadapnya.

1.8.8 Kualitas Data

Uji keabsahan data dalam penelitian, sering hanya ditekankan pada uji validitas. Menurut Creswell dan Miller 2000, Validitas mengacu pada tingkat akurasi temuan sebagaimana dipersepsikan oleh peneliti, partisipan, atau pembaca. Validitas merupakan menunjukkan sejauh mana data yang dikumpulkan dari objek penelitian sesuai dengan data yang dilaporkan oleh peneliti. Dalam pengujian keabsahan data, peneliti berfokus pada penggunaan teknik triangulasi guna memastikan bahwa temuan penelitian ini telah terverifikasi dan sesuai dengan fakta.

Triangulasi merupakan penggabungan data dari berbagai sumber dengan beragam metode pengumpulan data serta sumber data yang tersedia. Dalam triangulasi data, peneliti melakukan pengecekan berbagai sumber, cara, dan waktu.

1. Triangulasi teknik, berarti peneliti menerapkan berbagai teknik pengumpulan data dengan tujuan untuk mengumpulkan informasi dari sumber yang sama. Teknik yang digunakan mencakup observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi secara bersamaan..
2. Triangulasi sumber, berarti peneliti menggunakan teknik yang sama untuk mengumpulkan data dari berbagai sumber yang berbeda..
3. Triangulasi waktu